

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Dari Media



BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Tahun

2	0	2	1
---	---	---	---

Harian Umum

Online

Provinsi/Kabupaten/Kota Gorontalo

Gorut Jadi Percontohan PAD



LAPORAN hasil pemeriksaan semester II oleh BPK Perwakilan Gorontalo, diterima langsung oleh Bupati Gorut, Indra Yasin.

GORUT-GP - Memiliki banyak potensi daerah yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan merupakan jaminan bagi satu daerah jika potensi tersebut tidak dikelola atau dimanfaatkan dengan maksimal.

Disisi lain, PAD merupakan salah satu motor penggerak pembangunan. Rendahnya PAD, bisa menjadi salah satu faktor pembangunan di suatu daerah bergerak lambat. Di Gorontalo Utara (Gorut), obyek-obyek PAD memang belum dikelola maksimal.

Oleh karena itu, daerah terbungsu di Provinsi Gorontalo itu dijadikan sebagai percontohan daerah yang punya potensi PAD dengan banyaknya obyek-obyek pajak yang boleh

dikelola.

Sebagaimana yang menjadi penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo dari hasil pemeriksaan keuangan pada semester II Tahun 2021 yang telah diterima Bupati Gorut, Indra Yasin, pekan kemarin. "Ya, kita dijadikan semacam percontohan, khususnya untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah," ungkap Indra.

Indra mengaku, dari hasil penelitian BPK di lapangan, ada obyek-obyek yang boleh mendatangkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang mungkin selama ini belum terkelola. "Dari hasil audit mereka di lapangan, ternyata ada obyek-obyek pajak yang bisa mendatangkan pendapatan daerah. Sehingga, nanti ada

peningkatan pendapatan asli daerah dan itu direkomendasikan oleh BPK," imbuhnya.

Yang jelas, dari hasil pemeriksaan oleh BPK, Indra mengaku, ada rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan ke pemerintah daerah. "Saya tentu bersyukur Gorontalo Utara dijadikan percontohan, untuk pertama kalinya dilakukan survey untuk pemeriksaan mengenai obyek-obyek pajak," ucapnya. Selebihnya, Indra mengatakan, rekomendasi yang disampaikan BPK, nantinya akan dibahas bersama-sama dengan pihak DPRD. Sehingga nantinya ada perda yang dibahas dan diterbitkan untuk peningkatan pendapatan asli daerah. (abk)